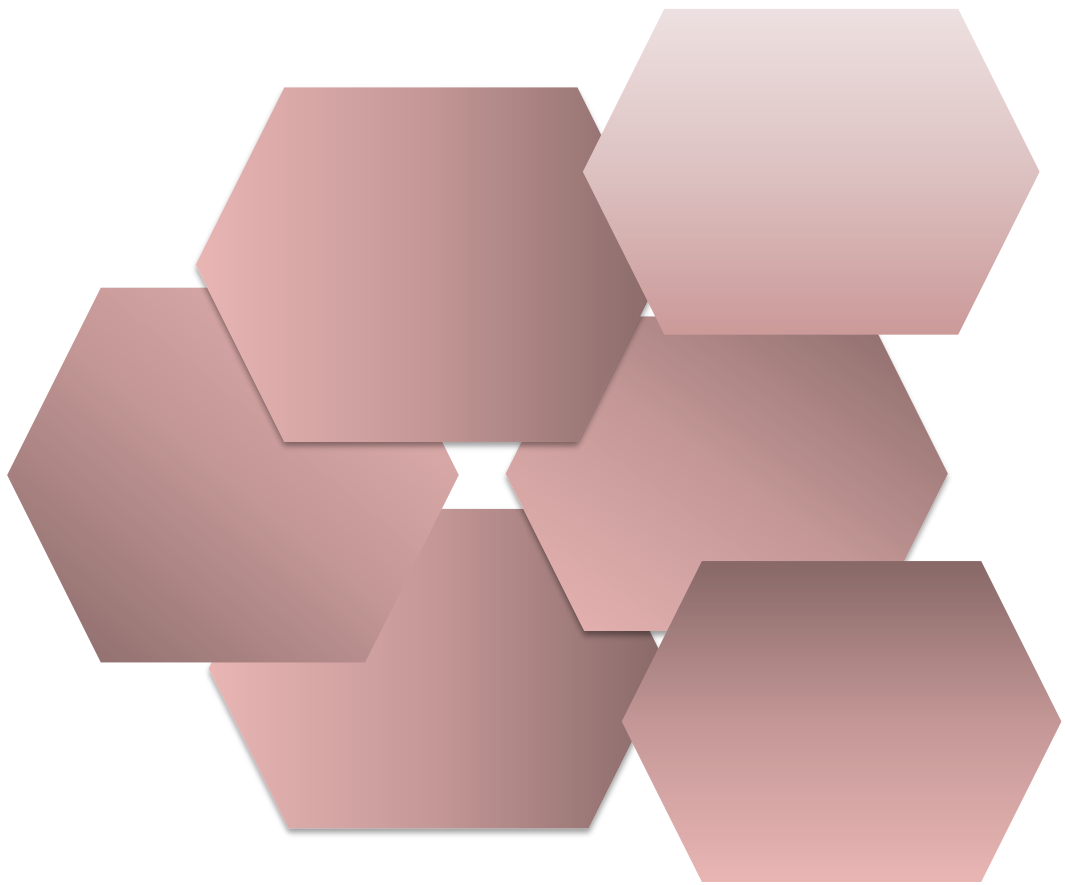


PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA  
BOROKO, JULI 2024

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan pelaksanaan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam pelaksanaannya tidak lepas dari dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Dokumen-dokumen yang dimaksud salah satunya adalah Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan setiap tahunnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salah satu lembaga teknis di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan usulan-usulan dari bawah yang telah dihimpun dalam pelaksanaan Musrenbang Desa hingga tingkat Kecamatan.

Dalam rangka merumuskan serta melaksanakan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk mendukung pencapaian RPJMD serta menjaga keberlanjutan Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renstra PD, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

- a. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor Tahun 2023 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 – 2026
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugasnya sehingga sasaran dan program kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- b. Menjadi tolak ukur dan acuan dalam pelaksanaan program / kegiatan serta mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- c. Mengarahkan pelaksanaan pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dan desa.
- d. Untuk merumuskan program – program strategis dan prioritas pembangunan dilingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- e. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang termuat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Secara sistematis Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut ;

- Bab 1. Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- Bab 2. Merupakan Bab Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja PD Tahun Lalu yang memuat uraian tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II, isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Reviuw terhadap Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- Bab 3. Merupakan bab Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang memuat uraian tentang Perubahan Program dan Kegiatan.
- Bab 4. Merupakan bab penutup.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi capaian pelaksanaan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Bulan ketiga Triwulan II tahun 2024 dilaksanakan dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun berjalan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pelaksanaan Program kegiatan Dinas Pembardayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan bulan ketiga Triwulan II dengan realisasi anggaran dari seluruh Program kegiatan sudah mencapai 54,10%

1. Realisasi Program / kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan sampai dengan triwulan II sesuai yang tertuang dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 62,03%

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan 0 %

#### Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 0%
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 0%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21,17%

#### Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35,16 %
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23,10%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 41,66%

#### Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 26,88%

#### b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

##### Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 55%
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 13,14%
- Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa 0%
- Fasilitas Penyusunan Profil Desa 27,76%
- Fasilitas Pengelolaan Aset Desa 32,82%

- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 0%
  - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 11,04%
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab / Kota
- Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ) 0%
  - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 0%
2. Realisasi Program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan yaitu :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100%
- b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat



yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab / Kota

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kel, Lembaga Adat Desa / Kel dan Masyarakat Hukum Adat 71,38%

3. Realisasi Program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab belum tercapai / terpenuhinya target kinerja
  - Faktor yang mempengaruhi belum tercapai / terpenuhinya target kinerja disebabkan terkendalanya dengan penyediaan sumber anggaran pada kegiatan yang tertata di triwulan I dan II.
5. Implementasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah dengan adanya pergeseran anggaran DPA maka dengan sendirinya dapat mempengaruhi target capaian realisasi anggaran SKPD
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tidak tercapainya realisasi sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu mempercepat pelaksanaan kegiatan agar realisasi penyerapan anggaran semakin baik dan target kinerja perangkat daerah tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja dan ketersediaan anggaran pada masing – masing OPD harus di perhatikan agar proses pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan Dinas Teknis.



**TABEL 2.1**  
**Capaian Kinerja SKPD s.d Triwulan II Tahun 2024**

**SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>14,00</b>	<b>14%</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>14</b>	<b>14%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Bln	9	64%
		12 Bln	5	42%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek / Pelatihan dan Sejenisnya	4 Orang	0	0%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,25</b>	<b>1%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik kantor yang tersedia	0 Paket	0	0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Paket	0	0%
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	1 Paket	0	0%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	5	33%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>13,00</b>	<b>13%</b>

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Lap	5	42%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	Lap	6	50%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Lap	6	50%
<b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>9,00</b>	<b>9%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	Unit	4	0,44
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	Unit	10	100%
<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa yang menetapkan APBDES sesuai Regulasi yang berlaku	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0,22</b>	<b>0%</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Persentase Desa yang Memasukan APBDes yang baik dan benar	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0,22</b>	<b>0%</b>
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	318	Dok	318	100%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	6	Dok	0	0%
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemeritah Desa	107	Orang	0	0%
Pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	2	Dok	0	0%
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa / Kel	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Desa	107	Desa / Kel	0	0%
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Aset Desa	106	Dok	0	0%
Pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	106	Orang	0	0%

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kel	3	Dok	3	100%
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10	Desa / Kel	0	0%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1</b>	<b>1%</b>
Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Kabupaten / Kota Serta Pemberdayaan masyarakat Hk. Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/ Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	100	%	0,67	1%
Peningkatan kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa / Kel, Lembaga Adat Desa / Kel dan masyarakat Hk. Adat	Jumlah Lembaga Kemadysarakatan Desa yang dilatih / dibina	1	Lembaga	0	0%
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan TTG	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemdes dalam Pemnafaatan TTG	1	Laporan	0	0%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5	Dok	2	40%

**Kepala Dinas PMD**  
**Kab. Bolaang Mongondow Utara**

**LA ODE OSNAWIR OJAYANA, S. Pd**  
Pembina Utama Muda, III / c  
NIP. 19680922 200012 1 001

## **2.2** Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu lembaga teknis di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membidangi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa maka program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai sasaran utama setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Pembinaan UPTD.

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada kualitas dan pengendalian kuantitasnya, peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil analisis perkembangan dan masalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa selanjutnya dipadukan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Dinas PMD.

Dalam pelaksanaan Program / Kegiatan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Untuk Program / Kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan anggaran lebih besar tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Anggaran yang diberikan tidak mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di antaranya :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
3. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
4. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
5. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
6. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
7. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kel dan Masyarakat Hukum Adat

Untuk merealisasikan pelaksanaan Program / Kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan target kinerja yang ingin di capai dalam perencanaan Rencana Strategis Dinas maka kiranya dapat memberikan anggaran lebih untuk pelaksanaan Program / Kegiatan agar dapat tercapai target kinerja yang telah di buat dalam perjanjian kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah.

### **2.3 Penelaahan Perubahan Usulan Program / Kegiatan PD**

Dalam pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pergeseran anggaran untuk kebutuhan kegiatan agar dapat mencapai target yang telah direncanakan.

Program / Kegiatan yang akan dilakukan pergeseran anggaran antara lain :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDEsa dan Lembaga kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD
- Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kel, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat



### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Rencana Program dan kegiatan Tahun 2024 berisi program kegiatan baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah akhir maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk menyusun Program kegiatan tahunan. Perubahan Rencana Kerja Program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah Program kegiatan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- b. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah untuk merumuskan prioritas Program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2024 serta merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tantangan apa yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selain itu untuk mengetahui Program kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Keberhasilan pelaksanaan pelayanan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh pemangku kepentingan secara harmonis dan semua tingkatan, mulai dari tingkat bawah hingga ketingkat yang lebih tinggi. Peran pemerintah daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman dan komitmen yang kuat dari semua pihak mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini disusun sebagai suatu dokumen penjabaran dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan Renja Perangkat Daerah disesuaikan dengan usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui pelaksanaan Musrenbang yang telah ditetapkan sebelumnya

Dalam pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan

tersebut tidak sampai menghambat pencapaian keseluruhan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini disusun dengan harapan semoga dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan Program dan kegiatan guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Boroko,        Juli 2024

**KEPALA DINAS PMD  
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**LA ODE OSNAWIR OJAYANA, S. Pd**

PEMBINA UTAMA MUDA, IV / C

NIP. 19680922 200012 1 001

**TABEL 3.2**  
**Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2024 Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

**SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

NO	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA 2024	Bertambah / (Berkurang)	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			APBD 2024	P-APBD				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	5			8	9			11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,381,682,629	2,381,682,629		Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1,856,544,389	1,856,544,389				
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Bln	14 Bln	1,406,698,519	1,406,698,519				
			12 Bln	12 Bln	449,845,870	449,845,870				
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	7,226,800	-				
2.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek / Pelatihan dan Sejenisnya	4 Org	4 Org	7,226,800	-	7,226,800			
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	183,785,640	188,012,440				
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket	-	4,226,800	4,226,800			
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket	27,115,640	27,115,640				
3.3	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	1 Paket	1 Paket	24,479,000	24,479,000				
3.4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	132,191,000	132,191,000				
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	246,545,800	249,545,800				
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5,687,500	5,687,500				
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	26,071,500	29,071,500	3,000,000			
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	12 Laporan	214,786,800	214,786,800				

6	<b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>87,580,000</b>	<b>87,580,000</b>				
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	9 Unit	75,760,000	75,760,000				
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	11,820,000	11,820,000				
2	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa yang menetapkan APBDES sesuai Regulasi yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>177,519,950</b>	<b>157,519,950</b>				
1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Memasukan APBDes yang baik dan benar</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>177,519,950</b>	<b>157,519,950</b>				
1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	318 Laporan	318 Laporan	9,150,000	9,150,000				
1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	6 Dok	6 Dok	12,956,000	- Rp 12,956,000				
1.3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	107 Org	107 Org	24,091,400	30,101,200	6,009,800			
1.4	Pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	2 Dok	2 Dok	29,375,600	- 29,375,600				
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa / Kel	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Desa	107 Dok	107 Dok	8,271,050	8,271,050	-			
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Aset Desa	106 Dok	106 Dok	8,946,600	2,936,800	- 6,009,800			
1.5	Pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	106 Org	106 Org	23,275,100	45,606,700	22,331,600			
1.6	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kel	3 Dok	3 Dok	61,454,200	61,454,200				
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Desa	10 Desa	-	-				

3	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	100 %	100 %	722,792,050	742,792,050				
1	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Kabupaten / Kota Serta Pemberdayaan masyarakat Hk. Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/ Kota	Persentase Lembaga Desa yang aktif	100 %	100 %	722,792,050	742,792,050				
1.1	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa / Kel, Lembaga Adat Desa / Kel dan masyarakat Hk. Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih / dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	637,219,250	657,219,250	Rp 20,000,000			
1.2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan TTG	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemdes dalam Pemanfaatan TTG	1 Laporan	1 Laporan	10,252,800	10,252,800				
1.3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dok	5 Dok	75,320,000	75,320,000				
	<b>Jumlah</b>				<b>3,281,994,629</b>	<b>3,281,994,629</b>	-			

KEPALA DINAS PMD

LA ODE OSNAWIR OJAYANA

NIP. 19680922 200012 1 001



|





**TABEL 2.1**  
**Capaian Kinerja SKPD s.d Triwulan II Tahun 2024**

**SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>14.00</b>	<b>14%</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>14</b>	<b>14%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Bln	9	64%
		12 Bln	5	42%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek / Pelatihan dan Sejenisnya	4 Orang	0	0%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.25</b>	<b>1%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik kantor yang tersedia	0 Paket	0	0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Paket	0	0%
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	1 Paket	0	0%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	5	33%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>13.00</b>	<b>13%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap	5	42%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Lap	6	50%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Lap	6	50%

6550000

2000000

0.305344

<b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>9.00</b>	<b>9%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	Unit	4	0.44
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	Unit	10	100%
<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa yang menetapkan APBDES sesuai Regulasi yang berlaku	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0.22</b>	<b>0%</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Persentase Desa yang Memasukan APBDes yang baik dan benar	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0.22</b>	<b>0%</b>
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	318	Dok	318	100%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	6	Dok	0	0%
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemeritah Desa	107	Orang	0	0%
Pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	2	Dok	0	0%
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa / Kel	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Desa	107	Desa / Kel	0	0%
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Aset Desa	106	Dok	0	0%
Pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	106	Orang	0	0%
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kel	3	Dok	3	100%
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10	Desa / Kel	0	0%

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1</b>	<b>1%</b>
<b>Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Kabupaten / Kota Serta Pemberdayaan masyarakat Hk. Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/ Kota</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0.67</b>	<b>1%</b>
Peningkatan kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa / Kel, Lembaga Adat Desa / Kel dan masyarakat Hk. Adat	Jumlah Lembaga Kemadysarakatan Desa yang dilatih / dibina	1	Lembaga	0	0%
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan TTG	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemdes dalam Pemnafaatan TTG	1	Laporan	0	0%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5	Dok	2	40%

**Kepala Dinas PMD**  
**Kab. Bolaang Mongondow Utara**

**LA ODE OSNAWIR OJAYANA, S. Pd**  
Pembina Utama Muda, III / c  
NIP. 19680922 200012 1 001